KLIPING

RABU KLIWON
• 26 OKTOBER 2022
• 1 RABIUL AKHIR 1444 H
• 30 MULUD 1956

Rakyat Merdeka 7

Kalau APBN Surplus

Bansos Mau Dinaikin, Amin

Pemerintah masih melanjutkan pemberian bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat yang membutuhkan. Bahkan, tidak menutup kemungkinan nominalnya akan ditambah.

PRESIDEN Jokowi berjanji akan menambah nilai bansos. Tapi itu baru rencana. Soalnya naik atau tidaknya bantuan itu, tergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Nanti kalau APBN ada lebih, Insya Allah akan kami tambah. Yang penting sekarang, sudah diterima semuanya," ujar Jokowi, di sela penyerahan bansos di Kantor Pos Cabang Balikpapan, Kalimantan Timur, kemarin.

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut, antara lain Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Hadir pula Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor dan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud.

Warga setempat selaku penerima manfaat yang sedang antre, nampak gembira. Bagaimana tidak, Kepala Negara dan para menterinya hadir langsung di lingkungan mereka tinggal.

Dalam kesempatan itu, bansos yang diserahkan antara lain Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU). Jokowi menegaskan, bantuan ini dapat digunakan oleh para penerima manfaat untuk meningkatkan gizi anak.

"Ini yang Rp 1,2 juta bantuan presiden, yang Rp 300 (ribu) BLT BBM. Bisa dibelikan untuk gizi anak," tuturnya.

Usai menyerahkan bansos, Jokowi menyampaikan, hingga saat ini penyaluran BLT BBM sudah mencapai 99,7 persen. Sedangkan BSU sudah mencapai 72 persen.

Eks Wali Kota Solo itu pun berharap, bansos tersebut dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kami harapkan, dengan bantuan ini konsumsi masyarakat bisa terjaga dan daya beli bisa terjaga. Ini akan mempengaruhi *growth* (pertumbuhan) ekonomi, baik di daerah maupun di negara kita," harapnya.

Dalam momentum tersebut, Ida Fauziyah menjelaskan, penyaluran BSU sudah memasuki tahap VI dan disalurkan melalui bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara).

"Kalau tahap VI totalnya sudah disalurkan 71,64 persen. Sisanya, mereka yang tidak memiliki bank Himbara akan kami salurkan melalui PT Pos Indonesia," jelasnya.

Ida mengemukakan, khusus untuk jumlah calon penerima BSU di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 393.819 orang.

Dari jumlah tersebut, BSU yang sudah disalurkan sampai tahap VI sebanyak 251.300 orang atau 63,81 persen.

Dia mengatakan, saat ini data sudah dalam proses di PT Pos Indonesia. Prosesnya sudah sampai tahap *cleansing*.

"Dana sudah disalurkan ke PT Pos masing-masing daerah, dan akan disalurkan Insya Allah dua hari ke depan," imbuhnya.

Ida menerangkan, penyaluran BSU juga dilakukan lewat PT Pos Indonesia. Soalnya, tidak semua penerima BSU memiliki nomor rekening bank yang tergabung dalam Himbara atau memiliki rekening yang bermasalah.

"Dengan demikian, kami berharap dalam waktu tidak lama semuanya akan selesai tersalurkan. Baik yang melalui Himbara maupun PT Pos Indonesia," pungkasnya. ■ JAR